

MEKANISME PEROLEHAN KADAVER DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SERTA PERJANJIAN YANG MENYERTAINYA

ABSTRAK

Ken Elsaning Savitri¹ Antari Innaka Turningsih²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perolehan Kadaver di RSUP Dr. Kariadi serta mengkaji manakala lembaga pendidikan dalam mendapatkan Kadaver dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang mana data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan alat wawancara. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUP Dr. Kariadi memiliki 2 (dua) cara perolehan Kadaver, yakni dari dalam RSUP Dr. Kariadi dan dari luar RSUP Dr. Kariadi. Mayat yang diperoleh dari dalam RSUP Dr. Kariadi merupakan pasien yang tidak memiliki keluarga, ataupun memiliki keluarga namun pihak keluarga memilih untuk menyerahkannya kepada rumah sakit. Mayat yang diperoleh dari luar RSUP Dr. Kariadi dapat berasal dari lembaga-lembaga sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), *Search and Rescue* (SAR), Kepolisian, Panti Jompo, dan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara perolehan mayat, termasuk dari mana saja rumah sakit boleh mendapatkan mayat. Hanya diatur bahwa mayat tersebut haruslah tidak memiliki keluarga atau tidak ada keluarga yang mencari, atau diserahkan sendiri oleh pihak keluarga atau yang bersangkutan. Kegiatan pembayaran biaya operasional yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan Kadaver dapat digolongkan sebagai perjanjian melakukan jasa karena memenuhi unsur-unsur perjanjian melakukan jasa, yakni adanya kesesuaian tujuan antara para pihak, salah satu pihak merupakan ahli di bidangnya, dan terdapat tarif. RSUP Dr. Kariadi memberikan daftar tarif untuk jasa yang mereka perbuat, dan bukan untuk bendanya, sehingga tidak ada transaksi atas benda, melainkan atas jasa.

Kata Kunci : perolehan Kadaver, jual beli

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**MECHANISM OBTAINED BY KADAVER IN RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG AS AN EDUCATIONAL
HOSPITAL AND THE ACCOMPANYING AGREEMENT**

ABSTRACT

Ken Elsaning Savitri³ Antari Innaka Turningsih⁴

This study aims to determine how the acquisition of cadavers in RSUP Dr. Kariadi and examine when educational institutions in obtaining cadavers can be regarded as a sale and purchase transaction.

This research is a descriptive study, the research obtained from secondary data sourced from primary and secondary legal materials. The author uses an empirical normative approach in which data and information are obtained from library research and field research. Data collection is done by conducting interviews using interview tools. The research data were then analyzed qualitatively.

The results showed that the RSUP Dr. Kariadi has 2 (two) ways of obtaining cadavers, namely from within Dr. Kariadi and from outside RSUP Dr. Kariadi. The bodies obtained from Dr. RSUP Kariadi are a patient who does not have a family or has a family but the family chose to submit it to the hospital. Corpses obtained from outside RSUP Dr. Kariadi can come from social institutions such as the Indonesian Red Cross (PMI), the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Search and Rescue (SAR), the Police, Nursing Homes, and the community. However, no laws and regulations are governing the acquisition of corpses, including from where hospitals can obtain corpses. It is only regulated that the body must not have a family or no family to search for or be handed over by the family of the person concerned. Activities of payment of operational costs carried out by parties requiring cadavers can be classified as service agreements because they fulfill the elements of the service agreement, namely the alignment of objectives between the parties, one of the parties is an expert in their field, and there is a tariff. RSUP Dr. Kariadi gives a list of tariffs for the services they make, and not for the goods, so that there are no transactions on objects, but on services.

Keywords: acquisition of cadavers, buying and selling.

³ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada